

MENAKAR *NEW MEDIA* SEBAGAI RUANG PUBLIK DALAM KONTEKS KEBHINEKAAN DI MAGELANG

Prihatin Dwihantoro¹, Moch. Imron Rosyidi^{1*}, Aftina Nurul Husna¹

*Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang
[*imron.rosyidi@ummgl.ac.id](mailto:imron.rosyidi@ummgl.ac.id)

ABSTRAK

Potensi pengguna internet terutama media sosial di Indonesia sangat besar. Dengan banyaknya pengguna tersebut mengakibatkan besarnya potensi kegaduhan nasional. Apalagi, munculnya berbagai elemen masyarakat yang intoleran dan penyebar *hoaks* semakin menambah kegaduhan nasional di sosial media, serta mengancam kebhinekaan. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi perpecahan negara. Seperti tindakan pada momentum tertentu pemerintah melakukan upaya pembatasan internet dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Tindakan tersebut tentu mendapat respon beragam baik positif maupun negatif. Berdasarkan berbagai hal tersebut penelitian ini ingin melihat, bagaimana peran *new media* sebagai ruang publik dalam merespon ancaman kebhinekaan. Teori yang digunakan adalah Ruang Publik dari Jurgen Habermas, dimana internet harusnya bisa menjadi ruang komunikasi guna menciptakan rasionalitas publik dalam mewujudkan Demokrasi Deliberatif. Metode penelitian ini menggunakan *mix methode* studi pustaka dan deskriptif kuantitatif, dengan responden berjumlah 25 orang yang dipilih secara purposif untuk disebar di wilayah Magelang sebagai sebuah studi pendahuluan. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman dari *new media*. Hasil kajian menunjukkan kekuatan berupa jumlah dan lama pengguna internet dapat dimaksimalkan. Kelemahan berupa kualitas dan karakteristik pengguna. Potensi adanya sarana prasarana, jangkauan, kedekatan. Ancaman yang dapat dilihat ada dua yakni manifest berupa *hoaks* dan hasutan, serta laten berupa tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: *Internet, Ruang Publik, Kebhinekaan*

ABSTRACT

Potential Internet users especially social media in Indonesia is very large. With many such users resulted in the magnitude of the national tougher potential. The emergence of various elements of society that are intolerant and the propagbar of hoax increasingly add to the national noise in social media, as well as threatening diversity. The situation encouraged the Government to take measures in the face of state divisions. Such actions at certain momentum governments make efforts to restrict the Internet with the aim of maintaining state stability. The action certainly received a varied response both positive and negative. Based on this, the research wants to see how the role of new media as a public sphere in responding to the threat of diversity. The theory used is the public sphere of Jurgen Habermas, where the Internet should be a communication room to be creating public rationality in realizing democracy deliberative. This method of research using the program

mix of literature study and descriptive quantitative analysis, with respondents amounting to 25 people selected Purposif to spread in Magelang region as a preliminary study. The analysis used is SWOT analysis, to see the Strengths, Weaknesses, Opportunities and challenges/Threats of new media. The results of this study show the power of number and length of internet users can be maximized. Weakness of quality and user characteristics. Potential infrastructure, reach, proximity. The threat can be seen there are two of the manifest in the form of hoaks and incitement, and latent in the form of the needs of the community.

Keywords: *Internet, Public Sphere, Diversity*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi internet (*new media*) telah diramalkan oleh Marshal McLuhan sejak 1964 (Logan et al., 1994). McLuhan berpendapat bahwa teknologi komunikasi akan sampai pada kemunculan, telepon tanpa kabel, teater tanpa gedung, dan bioskop tanpa lampu sorot (Morissan & Hamid, 2010). Media sosial juga merupakan salah satu ruang yang muncul akibat perkembangan media baru.

Pengguna sosial media di Indonesia sangat besar jika dilihat dari data yang ada. Dari salah satu platform yakni *Twitter* saja Indonesia tercatat memiliki 77 juta pengguna aktif, dari total 388 juta dari seluruh dunia. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 3 besar pengguna *Twitter* dari seluruh dunia pada tahun 2016. Hal tersebut ditambah dengan jumlah 4 milyar postingan */cuitan* pada 4 tahun terakhir (Manan, 2018).

Potensi tersebut juga diiringi dengan banyaknya oknum yang melakukan mobilisasi massa dengan menyebarkan *hoaks*. Seperti yang terjadi dalam kasus kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Puncak sebaran *hoaks* dan hasutan dalam kerusuhan Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah URL situs web penyebar *hoaks* mencapai 72.500. Penyebaran *hoaks* terus menurun, 42 ribu URL pada 31 Agustus 2019, 19 ribu URL pada 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 URL *hoaks* dan hasutan di pada 6 September 2019 (Juniarto, 2019).

Kasus tersebut sampai mendapat perhatian internasional terutama terkait pembatasan akses internet dalam wilayah Papua dan Papua Barat. Banyak pro dan kontra terkait upaya pemerintah dalam menjaga keharmonisan bernegara tersebut (Juniarto, 2019). Akan tetapi terbukti dengan pembatasan internet baik berupa pemblokiran menyeluruh, pemutusan jaringan (*Internet shutdown*), maupun pembatasan akses yang dilakukan

pemerintah telah berhasil menekan hoaks dalam menjaga stabilitas negara.

Pemikiran Jurgen Habermas bahwa masyarakat modern dalam sebuah Ruang Publik harus sampai pada titik *Demokrasi Deliberatif*. Asumsi tersebut berbicara bahwa pengambilan keputusan, bukan hanya pada pendapat umum atau perseorangan, tapi pada proses yang terbuka dan argumentatif, Singkatnya; Rasionalitas Komunikasi (Hardiman, 1993). Di era saat ini ancaman perpecahan sangat sulit dihindari, terbukti pemerintah sampai melakukan upaya di atas dalam menjaga stabilitas negara.

Hoaks dan ancaman sejenis lain adalah musuh bersama dalam kehidupan di Indonesia dengan ideologi Pancasila yang memiliki semangat kebhinekaan di era *New Media* ini. Dalam kasus tersebut demokrasi deliberatif di era saat ini sulit tercapai akibat publik tidak memahami bahwasanya kebebasan berpendapat selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain (Shelton, 2006). Sehingga disitulah rasionalitas komunikasi terbentuk seperti yang tercermin dalam sila keempat permusyawaratan rakyat.



Gambar 1. Diagram Venn Kebhinekaan Bersama penguat dan ancamannya di era *New Media* diolah peneliti dari berbagai sumber (2020)

Internet dan sosial media adalah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memunculkan rasionalitas komunikasi publik. Namun juga perlu digaris bawahi bahwa publik menemui ancaman hoaks yang dapat membahayakan kebhinekaan yang menjadi simbol dari negara Indonesia. Dari paparan di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran *new media* sebagai ruang publik dalam merespon ancaman kebhinekaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Habermas ruang publik adalah ruang di mana warga negara bisa berunding mengenai hubungan bersama mereka. Sehingga ruang publik merupakan sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda. Arena ini secara konseptual berbeda dengan negara, yaitu tempat untuk melakukan produksi dan sirkulasi diskursus yang bisa secara prinsip

merupakan hal yang sangat penting bagi negara (Wilkins, 2000).

Selain itu, ruang publik secara konseptual juga berbeda dengan ekonomi, yaitu bukan sebagai tempat untuk hubungan pasar seperti penjualan dan pembelian, tetapi merupakan tempat untuk hubungan-hubungan yang berbeda-beda dan menjadi tempat untuk melakukan perdebatan dan permusyawaratan. Menurut Habermas, dalam ruang publik "*private persons*" bergabung untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian publik atau kepentingan bersama (Kadarsih, 2008).

Ruang publik ini ditujukan sebagai mediasi antara masyarakat dan negara. Di sini ruang publik dikonotasikan sebagai tempat untuk diskusi mengenai hal-hal rasional yang tak terbatas mengenai hal-hal yang bersifat umum. Hasil dari diskusi merupakan opini publik yang menjadi konsensus mengenai kebaikan bersama. Singkatnya, *public sphere* berarti sebuah ruang yang menjadi mediasi antara masyarakat dimana publik mengatur dan mengorganisirnya sendiri sebagai pemilik opini publik (Supraja, 2018).

Dalam praktiknya pada ruang publik harusnya terjadi sebuah rasionalitas komunikasi, rasionalitas tersebut yang akan menjadi dasar terciptanya konsensus publik. Sehingga konsensus tersebut

memunculkan demokrasi deliberatif. Demokrasi yang berdasarkan pada prinsip rasionalitas dan menghargai pendapat orang lain (Hardiman, 2004).

Penelitian sejenis mengenai ruang publik telah dilakukan dari berbagai perspektif. Di antaranya seperti penelitian berjudul; *DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, dan memiliki asumsi bahwa media massa telah gagal menjalankan perannya sebagai ruang dalam menciptakan demokrasi deliberatif (Kadarsih, 2008). Kepentingan pasar dan target rating membuat media melupakan prinsip-prinsip utama dalam perannya sebagai ruang publik.

Selain itu penelitian mengenai bagaimana cara kerja ruang publik juga telah dilakukan. Penelitian berjudul *Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual* pada Kasus Satinah memiliki hasil yang menarik. Bahwasanya ruang virtual telah mampu menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mempertahankan diri serta melakukan perlawanan melalui aktivitas kolektif warga yang digerakkan oleh aktor-aktor tertentu. Gerakan tersebut dalam platform media sosial yang beragam mulai dari *Twitter*, *Facebook*, hingga *YouTube*. Didalam

ruang tersebut publik melakukan kampanye dalam mendukung Satinah atas kasus hukumnya (Sari & Siahainenia, 2015).

Terkoneksinya entitas secara global serta beragamnya media komunikasi dan atau interaksi melalui perangkat internet memberikan peluang baru terciptanya ruang virtual bagi demokrasi (Nasrullah, 2015). Selain itu Hoax sosial politik sangat rentan dimanipulasi sehingga dapat memecah kebhinekaan (Qorib, 2020). Dari kajian pustaka diatas dapat dilihat bahwa *new media* telah menjadi ruang publik baru. Penelitian ini belum pernah dilakukan karena sampai saat ini belum ada yang melihatnya dalam perspektif kebhinekaan. Serta pendekatan yang dilakukan peneliti melalui deskripsi *mixed methode* menjadi kebaruaran dalam kajian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

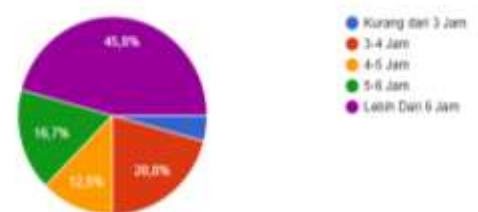
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka dan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dinilai baik dalam melakukan studi pendahuluan untuk riset selanjutnya (Neuman, 2013). Selain itu penelitian ini diharapkan untuk dikembangkan dalam konteks melihat peluang dan tantangan *new media* dalam konteks kebhinekaan. Analisis yang akan dilakukan adalah analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman *new media* sebagai sebuah ruang sosial (Helms & Nixon, 2010)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan dan Kelemahan

New Media sebagai ruang publik baru dalam menjaga kebhinekaan memiliki potensi besar. Meminjam pendapat Habermas tentang ruang publik adalah ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan publik maka internet adalah salah satu ruang paling representatif dalam mengemukakan pendapat. Selain jumlah pengguna yang besar, 50% pengguna internet rata-rata menggunakan internet lebih dari 5 jam sehari. Berarti 25% kehidupan masyarakat saat ini digunakan untuk mengakses internet.



Gambar 2. Prosentase lama pengguna internet

Sumber : data primer 2020

Selain itu dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet (Pratomo, 2019). Jika di komparasi dengan asumsi data di

atas maka lebih dari 80 juta orang di Indonesia menggunakan internet lebih dari 5 jam. Tentu ini adalah potensi besar dalam melakukan mobilisasi massa dalam upaya menjaga kebhinekaan, karena untuk mendapatkan massa sebanyak dengan durasi selama itu bukanlah perkara mudah. Melalui *new media* bisa menjadi ruang untuk mengakomodir masyarakat dalam upaya menjaga kebhinekaan.

Namun setiap kekuatan selalu di ikuti dengan kelemahannya. Dalam konteks *new media* sebagai ruang virtual pada upaya menjaga kebhinekaan kelemahan utamanya justru pada anonimnya karakteristik masyarakat virtual. Masyarakat terbiasa untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai topik apa yang sedang dibicarakan hari ini atau bahkan pada detik ini juga untuk diketahui. Kebutuhan tersebut membawa masyarakat berselancar di dunia maya dalam kapanpun dan dimanapun. Internet dan sosial media menjadi salah satu penyedia informasi yang paling dekat dan paling sering masyarakat akses (Carr, 2010). Terkait virus corona ini misalnya, masyarakat bisa mendapatkan beragam gambar dan video. Padahal, anonimitas dalam ruang virtual memungkinkan semua orang tanpa terkecuali dapat menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu publik belum sadar dalam penggunaan ruang publik selalu ada aksioma Habermas. Bahwa kebebasan kita selalu dibatasi oleh kebebasan publik. Kesadaran publik belum maksimal menjadikannya rawan untuk dijadikan sarana adu domba. Internet telah mendangkalkan cara bekerja otak, menurut Nicolas Carr dalam bukunya yang berjudul *The Shallow* publik internet cenderung tergantung dengan mesin (Carr, 2010). Mereka biasa membaca cepat tanpa konfirmasi dan mengambil kesimpulan dari permukaan. Itu mengakibatkan sangat mudah terjadinya hasutan yang ada di internet secara umum.

Dari sisi keberadaan pengguna, internet telah mentransformasikan perannya secara beragam. Bagi Habermas (2006) sendiri, keberadaan internet telah memperluas sekaligus mengfragmentasikan konteks komunikasi. Terbukti kasus hasutan dan *hoaks* seperti yang dipaparkan dalam bab pendahuluan di atas menunjukkan bahwa masih banyak oknum yang cenderung suka seenaknya dan bebas dalam menggunakan ruang publik secara tidak bertanggung jawab.

Potensi dan Ancaman

Potensi internet sebagai ruang yang murah dan dekat dengan masyarakat

menjadikannya sumberdaya yang dapat memperkuat kebhinekaan. Menurut data di atas dengan lama dan banyaknya pengguna, menunjukkan *New Media* adalah ruang informasi yang paling dekat dengan masyarakat. Karakteristiknya yang mudah diakses, ditambah dukungan pemerintah melalui program pembangunan *Palapa Ring* dengan membangun jaringan *fiber optic* sejauh 22.000 Km untuk seluruh wilayah di Indonesia menjadikan akses internet bukan lagi persoalan yang susah (Gewati, 2019).

Maka potensi ini bisa dimaksimalkan dalam upaya menjaga kebhinekaan. Kedekatan (*Aproximity*) adalah konsep utama dalam studi khalayak. Wacana persatuan, kebhinekaan dan penegakkan ideologi Pancasila tentu menjadi langkah awal yang harus dibicarakan publik dalam ruang ini. Pihak terkait bisa membuat konten, atau wadah yang menjadi representasi dalam menjalankan nilai-nilai kebhinekaan. Dengan demikian publik menjadi semakin dekat dengan agenda menjaga kebhinekaan karena dalam jarak yang sama atau *medium* yang sama.

Ancaman internet sebagai ruang publik dalam konteks kebhinekaan bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Namun dalam kajian kali ini hanya akan dibahas dari aspek keinginan publik dan

agenda negara. Pembahasan itu berdasar pada pemikiran Habermas bahwa ruang publik harusnya merupakan tempat untuk mengkomdir keduanya.

Dalam menyikapi *hoaks* yang merupakan ancaman berupa hasutan dan ujaran untuk memecah belah bangsa. Pemerintah memiliki agenda menjaga stabilitas negara, salah satunya adalah upaya Pembatasan Internet (pemblokiran internet/mengisolasi jaringan internet secara menyeluruh dan sebagian/*internet shutdown*). Hasilnya berkurang dengan sedikitnya URL yang membawa pesan *hoaks* atau hasutan.

Namun keinginan masyarakat justru sebaliknya, beberapa tagar dalam sosial media Twitter dan Instagram bernada menolak dan menghujat. Masyarakat yang terbiasa mengakses informasi dengan mudah merasa terbatas. Hal tersebut diperparah dengan beberapa aksi yang menolak hal tersebut.

Dalam survei yang dilakukan kajian ini menunjukkan bahwa, 16% Responden sangat tidak setuju, 40% Responden Tidak setuju, sisanya 24% ragu- ragu, 20 % setuju dengan upaya pemerintah melakukan upaya pembatasan internet. Data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat sebenarnya rata-rata kurang setuju dengan upaya tersebut.

Dalam kasus pembatasan internet Responden juga diminta untuk menjawab pertanyaan dalam dua peristiwa yang berbeda. Hasilnya dalam peristiwa pembatasan internet sidang putusan Mahkamah Konstitusi mayoritas Responden cenderung berpikir positif bahkan, 36 % menjawab setuju. Namun berbeda dalam kasus terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat Mayoritas Responden 44%. menjawab sangat tidak setuju.



Gambar 3. Perbandingan Responden ketika ditanya setuju atau tidak pembatasan internet dilakukan lagi jika terjadi kegaduhan nasional. Sumber: Data Primer (2020)

Hal tersebut mengindikasikan secara global bahwa meskipun pembatasan akses internet adalah upaya yang dinilai efektif namun bertentangan dengan keinginan publik. Maka diperlukan sebuah upaya rekonsiliasi publik dalam menyikapi problematika ini. Dalam sebuah kasus di India, pemadaman informasi memaksa demonstran dalam aksi kolektif untuk mengganti taktik tanpa kekerasan dengan taktik kekerasan. Artinya, justru dengan

ketiadaan informasi, intensitas kekerasan meningkat (Juniarto, 2019). Tentu hal ini justru menjadi ancaman yang latent bagi kebhinekaan. Mengingat konsep pemikiran Elisabeth Nolan neuman mengenai Spiral keheningan, bahwa opini publik yang tidak nampak di permukaan suatu saat akan melontar dan menimbulkan kekacauan opini jika tidak diakomodasi oleh opini dominan.

Unit Analisis	Hasil
<i>Strong</i> (Kekuatan)	Jumlah dan lama pengguna internet
<i>Weaknes</i> (Kelemahan)	Kualitas dan karakteristik pengguna
<i>Oportunities</i> (Potensi)	Sarana prasarana, jangkauan, kedekatan
<i>Thread</i> (Ancaman)	Manifest berupa hoaks dan hasutan, latent berupa tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam penanganan.

Tabel 1. Hasil Analisis Swot terhadap *New Media* dalam konteks kebhinekaan. Sumber: Data Primer (2020)

KESIMPULAN

Kekuatan *new media* dalam konteks menjaga kebhinekaan begitu besar dengan jumlah pengguna dan lama pengguna menjadikan kekuatan dalam malakukan mobilisasi massa. Akan tetapi karakteristik masyarakat yang tidak terbiasa selektif akan informasi ditambah dengan *new media* menjadikan

masyarakat menjadi lebih instan dalam segala hal membuat kualitas pengguna tak sebanding dengan kuantitas. Potensi berupa kedekatan dan sarana yang disiapkan pemerintah adalah hal yang dapat mendukung peran *new media* menjaga kebhinekaan. Di samping itu terdapat ancaman yang perlu dihindari dalam menjadikan *new media* sebagai ruang publik. Hal tersebut dibagi menjadi dua yakni ancaman Manifest berupa *hoaks* dan hasutan, serta ancaman laten berupa tidak terakomodasinya kebutuhan

masyarakat dalam penanganan kegaduhan Nasional.

Kajian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyarankan untuk melakukan kajian mendalam dan meluas dengan jumlah informan dan data yang lebih komprehensif serta representatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru dibidang kajian komunikasi terutama komunikasi digital dan pengembangan pemikiran Jurgen Habermas terkait Ruang Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Carr, N. (2010). *THE SHALLOWS What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. NORTON & COMPANY.

Gewati, M. (2019). Mengenal Lebih Jauh "Tol Langit." *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/10350001/mengenal-lebih-jauh-tol-langit>

Hardiman, F. B. (1993). Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu. *Masyarakat & Politik Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas, Yogyakarta, Kanisius*.

Hardiman, F. B. (2004). Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto. *Majalah Basis Nomor*, 11–12.

Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis—where are

we now? *Journal of Strategy and Management*.

Juniarto, D. (2019). Internet Shutdown di Indonesia: Ironi di Zaman Reformasi dan Revolusi 4.0. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/100810565/internet-shutdown-di-indonesia-ironi-di-zaman-reformasi-dan-revolusi-40>

Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 9(1), 1–12.

Logan, R. K., McLuhan, M. A., & McLuhan, M. A. (1994). *Understanding media: The extensions of man*. MIT press.

Manan, A. (2018). *Ancaman Baru Dari Digital*. https://aji.or.id/upload/article_doc/Laporan_Tahunan_AJI_2018_-_Ancaman_Baru_dari_Digital_OK21.

pdf

- Morissan, A. C. W., & Hamid, F. (2010). Teori komunikasi massa. *Ghalia Indonesia. Jakarta. Morissan,(2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.*
- Nasrullah, R. (2015). Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas. *Komunikator*, 4(01). <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/188>
- Neuman, W. L. (2013). Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jakarta: PT. Indeks.*
- Pratomo, Y. (2019). APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa. *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Qorib, F. (2020). Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang. *WARTA Iski*, 3(01), 13–22.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 105–118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Shelton, A. G. (2006). Public Sphere and Communicative Rationality: Interrogating Habermas's Eurocentrism. *Journalism and Communication Monographs*, 8(2), 93–156. <https://doi.org/10.1177/15226379060800201>
- Supraja, M. (2018). *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. UGM PRESS.
- Wilkins, K. G. (2000). *Redeveloping communication for social change: Theory, practice, and power*. Rowman & Littlefield.